PONTIANAK POST

 Jan
 Feb
 Mar
 Apr
 Mei
 Jun
 Jul
 Agust
 Sept
 Okt
 Nov
 Des
 2021
 Hal.:
 I

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Tindaklanjuti Evaluasi Kemendagri

DPRD Gelar Paripurna Raperda APBD Perubahan 2022

PONTIANAK - DPRD Provinsi Kalimantan Barat mengadakan paripurna persetujuan terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2022 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Sidang Paripurna sendiri digelar pada hari Kamis (17/11) di ruangan Balairungsari. Selain dihadiri Sekda Kalbar bersama kepala OPD di Kalbar juga pimpinan dan anggota DPRD Kalbar.

Sekda Kalbar, Harisson kepada sejumlah wartawan menyampaikan bahwa

♦ Ke Halaman 7 kolom 1



DENI HAMDANI/PONTIANAK POST

PARIPURNA: DPRD Kalimantan Barat mengelar rapat paripurna persetujuan terhadap Raperda APBD Perubahan tahun 2022 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, Kamis (17/11) di ruang Balairungsari DPRD Kalbar.

PONTIANAK POST

 Jan
 Feb
 Mar
 Apr
 Mei
 Jun
 Jul
 Agust
 Sept
 Okt
 Nov
 Des
 2022
 Hal.: |

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Tindaklanjuti Evaluasi Kemendagri

Sambungan dari halaman 1

penetapan ini merupakan tindak lanjut evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap APBD Perubahan, yang sebelumnya sudah disepakati antara DPRD dan Pemprov Kalbar.

"Mendagri sudah memberikan evaluasi terkait Raperda APBD Perubahan 2022. Untukitu, Dewan perlu melakukan menetapkan persetujuan dewan, terhadap hasil evaluasi," kata Harisson.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur menyebutkan bahwa hasil evaluasi dari

Kemendagri terhadap APBD Perubahan sudah disampaikan ke DPRD.

"Untuk hasil evaluasinya sudah disampaikan kepada DPRD Kalbar dan selanjutnya dibahas bersama eksekutif dengan Badan Anggaran termasuk disetujui oleh pimpinan DPRD," jelasnya.

Setelah pembahasan ini dilakukan bersama pimpinan dan badan anggaran, maka balik lagi ke Kemendagri untuk mendapat nomor registrasi.

"Sesuai aturan baru disampaikan paripurna selanjutnya. Inilah yang dilanjutkan. Karena agenda rapat paripurna selanjutnya sekarang," ujarnya.

Sementara, khusus penetapan perda untuk dibahas di 2023, setidaknya ada 11 tahapan. Tentunya tahapan tahun 2023. "Ini baru usulan yang disetujui. Tinggal melihat kjaian teknis. Makanya kita minta segera kajian teknis dimasukkan. Kalau tidak dimasukkan mana mau dibahas," ujarnya.

Prabasa berharap Raperda yang diusulkan ini bisa masuk ke Bapemperda. Nah yang tadinya hasil dari laporan evaluasi perubahan APBD tahun 2022, memangb seperti begitu mekanismenya. Setelah menyetujui APBD, maka paripurna pe-

rubahan dilakukan lewat tahapan evaluasi Kementerian Dalam Negeri. "Hasil evaluasi disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama eksekutif dengan badan anggaran dan disetujui pimpinan DPRD," katanya.

Kemudian persyaratan selanjutnya adalah harus dibahas oleh pimpinan dan badan anggaran. "Sudah dibahas. Setelah dibahas balik lagi ke Kemendagri untuk memperoleh nomor registrasi. Sesuai aturan lalu disampaikan pada paripurna selanjutnya. Inilah yang dilanjutkan," pungkasnya.